

Ketimpangan Pendapatan Penyebab Tidak Bahagia (*Income Inequality Causes of Unhappiness*)

Heru Wahyudi,¹ Ages Tiara²

Universitas Lampung, Lampung^{1,2}

Her.wahyudi@gmail.com¹ agestiar1038@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 30 Agustus 2022

Revisi 1 pada 7 September 2022

Revisi 2 pada 17 September 2022

Disetujui pada 27 September 2022

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to examine the influence of economic and non-economic factors on the level of happiness of the population in the provinces of Java and Sumatra.

Research methodology: The analytical method used in this study is the Panel Data Analysis method for 16 provinces in 2014 and 2017.

Results: The results showed that there was a positive and significant relationship between income per capita and the average length of schooling on the level of happiness, while income inequality had a negative and significant effect on the level of happiness, and there was a positive and insignificant relationship between life expectancy and the Indonesian democracy index on the level of happiness of the population in the provinces of Java and Sumatra.

Limitations: The limitation in this study is that only 2 years of observation are used for 10 provinces with panel data regression.

Contribution: The results obtained from this study are expected to be one of the references in making policy directions based on the data presented to adjust the right policies, especially to increase the happiness of the population in Indonesia.

Keywords: *Per Capita Income, Average Length of Schooling, Level of Happiness*

How to cite: Wahyudi, H., Tiara, A. (2022). Ketimpangan Pendapatan Penyebab Tidak Bahagia. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 125-138.

1. Pendahuluan

Pada hakikatnya, pembangunan nasional bertujuan sebagai perwujudan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Paradigma pemerintah selama ini dalam memandang kinerja dan keberhasilan pembangunan suatu negara hanya dilihat dari pengukuran yang berbasis moneter, namun demikian keberhasilan pembangunan suatu negara yang ditinjau dari tolak ukur moneter saja, belum sepenuhnya mampu mencerminkan kenyataan hidup yang sebenarnya di dalam masyarakat Rositawati et al. (2020). Pada tanggal 20 Maret 2020 *World Happiness Report* (WHR) yang disusun *Sustainable Development Solutions Network* untuk PBB yaitu laporan kebahagiaan dunia yang kedelapan, melaporkan daftar terbaru negara-negara paling bahagia di dunia dari 156 negara dengan berdasarkan rata-rata survei tiga tahun antara tahun 2017 dan 2019. Laporan *World Happiness Report* berdasarkan enam indikator yakni pendapatan, tunjangan sosial, usia harapan hidup, kebebasan menentukan pilihan, keramahan, dan kepercayaan. Hasil laporan WHR2020 tersebut menyatakan bahwa negara Finlandia adalah negara terbahagia selama tiga tahun berturut-turut dan mencapai skor kebahagiaan hingga sebesar 7.809 pada skala 0 sampai 10.

Penduduk Finlandia menikmati kualitas hidup, keamanan, serta pelayanan publik yang tinggi, dengan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang rendah dari negara-negara *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) diantaranya Austria, Belgia, Denmark, Swedia, Norwegia, Swiss, Prancis, dan Inggris.

Kebahagiaan sebagai visi serta upaya pemerintah yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (*public well-being*), berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia mempunyai konsekuensi dalam mendorong peningkatan dan pencapaian dengan berupaya mencapai kesejahteraan (*well-being*) bagi setiap warga negaranya. Pada era tahun 1970-an pembangunan nasional lebih memfokuskan kajian kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang intensif. Sebaliknya, pembangunan sosial yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan nyatanya masih relatif sedikit mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah kemudian baru memberikan perhatian pada pembangunan sosial sejak akhir tahun 1980-an. Perhatian pemerintah pada pembangunan sosial baru meningkat setelah didasari oleh adanya kesadaran terhadap berbagai keterbatasan dari indikator ekonomi yang berbasis moneter (*monetary-based indicators*), yang erat kaitannya dengan evaluasi terhadap kinerja dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Badan Pusat Statistik (2017).

Amerika Serikat menjadi negara dengan urutan ke-18 dengan skor kebahagiaan sebesar 6.940 (skala 0 sampai 10). Padahal, Amerika Serikat telah menjadi negara terkaya dengan GDP terbesar di dunia sejak tahun 1980. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian kebahagiaan di Amerika Serikat yang berkaitan dengan pendapatan dan pertama kali dilakukan oleh Easterlin (1974). Penelitian Easterlin menemukan bahwa terdapat *paradox of happiness* atau *income paradox* yang lebih dikenal dengan *Easterlin Paradox*, menyebutkan bahwa pendapatan yang meningkat tidak memiliki kemampuan dalam meningkatkan kebahagiaan seseorang. Easterlin (1974) menjelaskan anomali tersebut dengan menyatakan bahwa tingkat pendapatan absolut penting sampai titik tertentu — terutama ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi — setelah itu perbedaan pendapatan relatif lebih penting. Terdapat aspek lain diluar pendapatan yang berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang, dan pendapatan berpengaruh seiring berjalannya waktu.

Penemuan yang sama oleh Clark et al. (2008) di Amerika Serikat bahwa terjadi fenomena *Easterlin Paradox* yang memperlihatkan adanya faktor lain selain pendapatan (material) bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan. Pendapatan absolut bukan menjadi faktor penting penentu kebahagiaan akan tetapi pendapatan relatif dan perbandingan pendapatan (*income comparison*) Clark & Senik (2011) dan *income aspirations* Frey & Stutzer (2010). Helliwell & Putnam (2004) menyebut adanya faktor non material yang mampu berperan penting seperti dimensi sosial dari *human well-being*. Bartolini & Bilancini (2010) lebih spesifik menyatakan adanya faktor kualitas serta kuantitas relasi sosial merupakan faktor dalam menjelaskan pertumbuhan *subjective well-being*. Sejalan dengan hal tersebut, kohesi sosial menjadi faktor penting dalam mendukung kepuasan hidup individu Berger-Schmitt (2002).¹

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, ditemukan studi baru bahwa ukuran tingkat kesejahteraan penduduk sangat penting diperhatikan bagi perumusan kebijakan publik, tidak saja hanya pada ukuran moneter tetapi juga harus memperhatikan faktor non ekonomi. Kapteyn et al. (2010) menyatakan indikator kebahagiaan digunakan sebagai pengukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan dapat menjadi cerminan tingkat kesejahteraan relatif individu Badan Pusat Statistik (2017).

Selama beberapa tahun terakhir ukuran tingkat kesejahteraan penduduk semakin banyak diakui karena penting untuk dicermati sehingga tidak hanya menggunakan pengukuran dalam moneter (*Beyond Gross Domestic Product*). Didukung pula oleh World Bank (2011) dengan menekankan bahwa kesejahteraan penduduk tidak bisa jika hanya dipandang dari sisi moneter. Indikator kesejahteraan yang disusun tidak hanya bisa menjelaskan kondisi kemakmuran material (*welfare* atau

well-being) saja, tetapi lebih mengarah kepada kondisi kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*) Badan Pusat Statistik (2017).

Frey & Frey (2013) mengatakan terdapat berbagai alasan mengapa para ekonom penting dan perlu untuk menggunakan pendekatan kebahagiaan atau *happiness*. Dalam satu dekade ini, para ekonom telah mencoba untuk memfokuskan kajian pada *Economics of Happiness*, atau lebih dikenal sebagai salah satu pendekatan terhadap kesejahteraan (*Subjektive Well-Being*). Dengan melakukan pengukuran mengenai tingkat kebahagiaan, negara dapat terhindar dari “*happiness traps*” atau jebakan kebahagiaan, dimana Produk Nasional Bruto terus meningkat namun tingkat kebahagiaan masyarakat stagnan atau bahkan menurun.

Kebahagiaan bagi setiap individu menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kebahagiaan dari individu yang sudah dianggap penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi selanjutnya akan dikaji lebih jauh dengan memberikan kehadiran perspektif baru yang terkait dengan ekonomi kebahagiaan Todaro & Smith (2011). Hal yang perlu dilakukan adalah membangun masyarakat yang kritis untuk meningkatkan pembangunan Malia & Hamzah (2017).

Salah satu ukuran dalam perekonomian baru tingkat kesejahteraan di dalam ilmu ekonomi yang sekarang sedang menjadi perhatian para pengambil kebijakan ialah indeks kebahagiaan (*happiness index*). Kehadiran ekonomi kebahagiaan ini bukan berarti akan menggeser ukuran terhadap kesejahteraan individu yang berdasarkan pendapatan semata, tetapi akan berguna untuk saling melengkapi pengukuran dengan menghadirkan aspek yang sebelumnya tidak digunakan, dan hasilnya semata-mata sebagai manfaat dari pembaruan ilmu ekonomi yang berguna bagi peningkatan sumber daya manusia. Kemudian akan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih akurat terkait tingkat kebahagiaan yang kemudian memberikan gambaran tingkat kesejahteraan yang digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Landasan Teori

Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi Kelembagaan melihat bagaimana peran dari institusi atau lembaga baik formal atau informal dengan sistem nilai, sosial budaya, dan undang-undang yang ditetapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Yustika (2012) dalam buku *Ekonomi Kelembagaan* menyatakan bahwa pada negara yang memiliki kelembagaan yang lebih sempurna sampai sejauh mana kualitas birokrasi dan kebijakan pemerintah dapat memberikan respons terhadap pertumbuhan ekonomi yang akhirnya memberikan dampak terhadap kebahagiaan yang merupakan bagian daripada kesejahteraan.

Fungsi dan Peran Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian dari berbagai negara, baik pada sistem perekonomian kapitalis, sosialis, ataupun campuran, pemerintah selalu memiliki peranan yang sangat krusial. Adam Smith dalam teorinya mengemukakan bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi pemerintah dalam memelihara pertahanan dan keamanan negara.
2. Fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan peradilan.
3. Fungsi pemerintah dalam menyediakan barang-barang yang tidak mampu disediakan oleh pihak swasta.

Dalam perekonomian modern peranan pemerintah mengalami perubahan yaitu:

1. Peran alokasi yaitu peran pemerintah dalam menghadirkan serta mengupayakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi mampu dimanfaatkan secara optimal.
2. Peran distribusi yaitu peran pemerintah dalam mengupayakan agar distribusi pendapatan ditengah masyarakat menjadi merata dan mensejahterakan masyarakat.

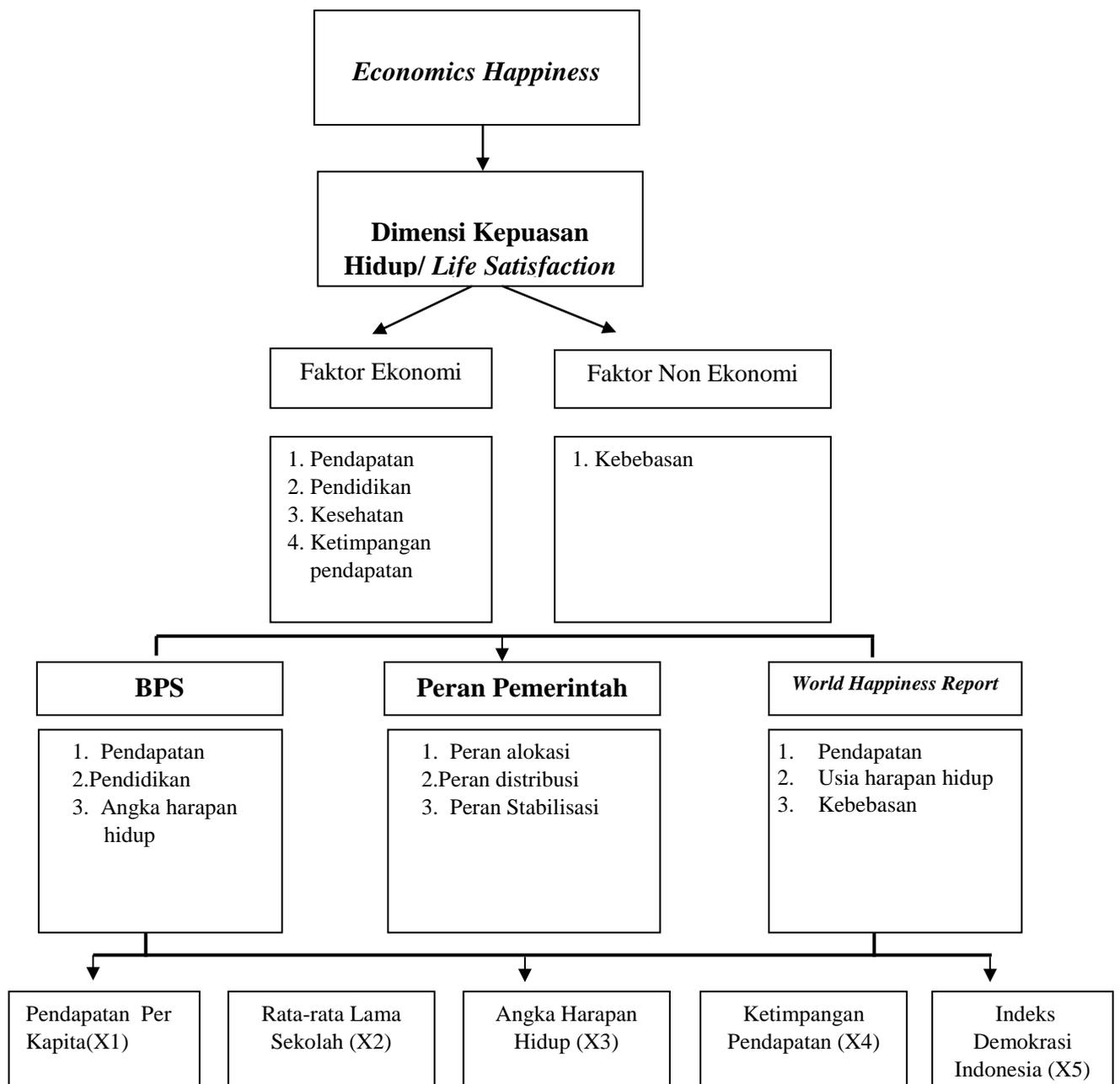
3. Peran stabilisasi yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap Guritno Mangkoesoebroto (1993).

Barang dan jasa yang ada tidak semuanya dapat dihadirkan atau disediakan oleh pihak swasta, adanya keterbatasan swasta tersebut membuat pemerintah mempunyai peran dalam menyediakan barang dan jasa yang tidak mampu disediakan oleh swasta yang disebut barang publik atau barang yang tidak mampu disediakan oleh sistem pasar atau transaksi antara penjual dan pembeli seperti jalan raya, pembersih udara, dan sebagainya. Dengan begitu, dibutuhkan peran pemerintah agar mengusahakan sumber-sumber ekonomi agar dapat berjalan dengan efisien. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum (*public well-being*) adalah dengan mengalokasikan anggaran menjadi belanja untuk kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, serta menjaga keamanan dan stabilitas negara, sehingga pemerintah memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan kebahagiaan warga negaranya.

Pengembang Hipotesis

Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan lembaga survei statistik resmi yang bertanggungjawab sebagai badan publikasi laporan serta informasi yang penting terkait fenomena ekonomi yang nyata di Indonesia. BPS telah mengikuti perkembangan pemikiran internasional yang terkait dengan pengukuran kesejahteraan subjektif dan melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dan instrumen pengukuran tingkat kebahagiaan yang dimulai sejak tahun 2012 Badan Pusat Statistik (2017).

Pemerintah selanjutnya mempunyai peranan penting di dalam perekonomian Indonesia dengan menjalankan peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang bertujuan untuk mencapai kepuasan hidup atau kebahagiaan (*happiness*) penduduk. Lebih lanjut, *World Happiness Report* yakni laporan kebahagiaan dunia sejak 2012 yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengambil peran dalam mengukur kebahagiaan masyarakat dunia serta merupakan paradigma ekonomi yang baru dan semata-mata bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu untuk menganalisis dan mengetahui kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera berdasarkan pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi yakni variabel independen pendapatan per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan indeks demokrasi Indonesia dengan berdasarkan rujukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Lokasi yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup wilayah di 16 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera pada tahun 2014 dan 2017, yang terdiri dari: (1) Prov. Aceh; (2) Prov. Sumatera Utara; (3) Prov. Sumatera Barat; (4) Prov. Riau; (5) Prov. Jambi; (6) Prov. Sumatera Selatan; (7) Prov. Bengkulu; (8) Prov. Lampung; (9) Prov. Kepulauan Bangka Belitung; (10) Prov. Kepulauan Riau; (11) Prov. DKI Jakarta; (12) Prov. Jawa Barat; (13) Prov. Jawa Tengah; (14) Prov. DI Yogyakarta; (15) Prov. Jawa Timur; dan (16) Prov. Banten. Digunakan periode waktu 2014 dan 2017 saja karena

disebabkan oleh keterbatasan data dari Badan Pusat Statistik yang digunakan dengan memakai skala 0-100 yang menggambarkan semakin tinggi besaran indeks, maka dapat menunjukkan tingkat kehidupan yang lebih baik, begitupun sebaliknya.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi instansi pemerintah, yaitu publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya data tahun 2014 dan 2017. Jenis data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka hasil dari penghitungan dan pengukuran. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu indeks kebahagiaan, laju pertumbuhan PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, indeks gini ratio, dan indeks demokrasi Indonesia kategori kebebasan sipil pada tahun 2014 dan 2017 yang disatukan dalam bentuk data panel.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
PDRB Perkapita	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{jumlah penduduk}}$
Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	$\text{RLS} = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Keterangan:</p> <p>RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>X_i : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>n : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>
Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah suatu indeks sebagai perkiraan rata-rata tambahan umur yang masih akan dijalani oleh seseorang diharapkan dapat terus hidup.	AHH : (<i>age specific death rate/ ASDR</i>)
Ketimpangan Pendapatan	Dalam penelitian ini, digunakan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan alat Indeks Gini Ratio (IGR). Indeks Gini Ratio adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk.	<p><i>Gini Ratio:</i></p> $\text{GR} = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <p>Keterangan:</p> <p>f : Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.</p> <p>Y_i: Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.</p>
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.	<p>Indeks Demokrasi Indonesia:</p> $\text{IDI}_{\text{Indonesia}} = \sum_{i=3}^3 \text{PIL}(A_i)$ <p>Keterangan:</p> <p>$\text{IDI}_{\text{Indonesia}}$ = indeks demokrasi Indonesia</p>

		P_i = nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3) $I(A_i)$ = indeks aspek ke-i (i = 1) = aspek kebebasan sipil (i = 2) = hak-hak politik (i = 3) = lembaga demokrasi
--	--	---

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TKH	KAP	RLS	AHH	KPN	IDI
Mean	69.87500	3.395625	8.421875	70.56250	0.381969	80.62500
Median	70.00000	3.865000	8.300000	70.00000	0.385500	82.00000
Maximum	73.00000	5.490000	11.00000	75.00000	0.444000	93.00000
Minimum	67.00000	-0.690000	6.900000	68.00000	0.296000	47.00000
Std. Dev.	1.879430	1.580594	0.939710	2.015064	0.039469	9.707829
Observations	32	32	32	32	32	32

Analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Kebahagiaan

Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, tingkat kebahagiaan (TKH) penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 69,88, tingkat kebahagiaan tertinggi dengan indeks kebahagiaan sebesar 73,0 berada di provinsi Kepulauan Riau dan tingkat kebahagiaan terendah dengan indeks kebahagiaan sebesar 67,0 berada di provinsi Sumatera Utara dengan nilai standar deviasi indeks kebahagiaan adalah sebesar 1,879430.

2. Pendapatan Per Kapita

Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, pendapatan per kapita (KAP) penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,40%, pendapatan per kapita tertinggi sebesar 5,49% berada di provinsi Jawa Timur dan pendapatan per kapita terendah sebesar -0,69% berada di provinsi Riau dengan nilai standar deviasi pendapatan per kapita adalah sebesar 1,580594.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 8,42 tahun, rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 11 tahun berada di provinsi DKI Jakarta dan rata-rata lama sekolah terendah sebesar 6,9 tahun berada di provinsi Jawa Tengah dengan nilai standar deviasi rata-rata lama sekolah adalah sebesar 0.939710.

4. Angka Harapan Hidup

Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, angka harapan hidup (AHH) penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 70,56 tahun, angka harapan hidup tertinggi sebesar 75 tahun berada di provinsi DI Yogyakarta dan angka harapan hidup terendah sebesar 68 tahun berada di provinsi Sumatera Utara dengan nilai standar deviasi AHH adalah sebesar 2,015064.

5. Ketimpangan Pendapatan

Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, ketimpangan pendapatan (KPN) penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,382, ketimpangan pendapatan tertinggi sebesar 0,444 indeks berada di provinsi DI Yogyakarta dan ketimpangan pendapatan terendah sebesar 0,296 indeks berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai standar deviasi ketimpangan pendapatan adalah sebesar 0,039469.

6. Indeks Demokrasi Indonesia

Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 80,63, Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi sebesar 93 indeks berada di provinsi DI Yogyakarta dan Indeks Demokrasi Indonesia terendah sebesar 47 indeks berada di provinsi Sumatera Barat dengan nilai standar deviasi Indeks Demokrasi Indonesia adalah sebesar 9,707829.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kebahagiaan penduduk di Pulau Jawa lebih disebabkan oleh pendapatan yang banyak, kualitas pendidikan yang baik, namun disertai pula dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Selanjutnya, kebahagiaan penduduk di Pulau Sumatera lebih disebabkan oleh kualitas pendidikan yang merata, namun disertai pula dengan ketimpangan pendapatan yang juga tinggi di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka metode estimasi regresi data panel yang paling tepat adalah metode Fixed Effect Model (FEM).

Berikut adalah koefisien regresi dengan metode Fixed Effect Model (FEM):

$$TKH_{it} = 6,258536 + 0,583001KAP_{it}^* + 5,576003RLS_{it}^* + 0,297532AHH_{it} - 25,71662KPN_{it}^{**} + 0,043470IDI_{it}$$

* $\alpha = 5\%$

** $\alpha = 10\%$

Konstanta (c) sebesar 6,258536 artinya jika variabel pendapatan per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan indeks demokrasi Indonesia dianggap konstan maka tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera adalah sebesar 6,26 indeks. Maka dapat dinyatakan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera sudah bahagia dan seluruh variabel berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan penduduk kecuali angka harapan hidup dan indeks demokrasi Indonesia.

Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Tingkat Kebahagiaan Penduduk di Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita (KAP) yang dapat mewakili pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Koefisien regresi variabel pendapatan per kapita sebesar 0,583001 artinya jika pendapatan per kapita meningkat sebesar 1% maka tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera akan naik sebesar 0,58 indeks, ceteris paribus. Maka, dapat dinyatakan bahwa pendapatan per kapita yang dapat mewakili pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan hipotesis. Indonesia merupakan negara berkembang dimana masyarakatnya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga adanya peningkatan pendapatan membuat masyarakat mampu untuk mengkonsumsi yang lebih banyak dari sebelumnya, dengan begitu pendapatan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan penduduk Indonesia khususnya di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Hasil penelitian ini menolak adanya fenomena Easterlin (1974) yang berkata bahwa peningkatan pendapatan tidak membuat orang bahagia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Howell & Howell (2008) yang mengemukakan bahwa status ekonomi memiliki korelasi terkuat dengan subjective well-being (kesejahteraan individu atau kebahagiaan) cenderung dilaporkan di negara berkembang yang miskin, sedangkan korelasi terlemah cenderung ditunjukkan di negara maju yang lebih kaya. Penelitian Puji Rahayu (2016) juga menemukan bahwa kebahagiaan di Indonesia secara positif dipengaruhi oleh pendapatan. Penelitian yang dilakukan Landiyanto et al. (2010) dan Sohn (2014) penelitian ini menekankan pada pentingnya faktor material (pendapatan) bagi kebahagiaan di Indonesia. Diener & Seligman (2004) dan Kesebir & Diener (2008) mengungkapkan pendapatan berperan penting dalam kesejahteraan di negara berkembang. Seseorang akan selalu mengejar kepuasan dengan cara memperoleh kekuasaan dan memperluas tercapainya keinginan.

Adanya teori utilitas ekonomi menunjukkan bahwa ketika orang memperoleh pendapatan dan kekayaan, mereka akan mampu menjangkau barang-barang yang mengarah pada peningkatan konsumsi dan pada akhirnya pada peningkatan utilitas atau kepuasan. Pendapatan yang tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi peningkatan konsumsi pada pengeluaran rumah tangga sehingga pengeluaran per kapita tidak dibawah garis kemiskinan dan akhirnya mampu meningkatkan kebahagiaan. Tingginya pendapatan per kapita suatu wilayah bisa mengindikasikan bahwa suatu wilayah tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan menambah pertumbuhan jumlah penduduk serta mampu mengelola sektor-sektor ekonomi domestik yang potensial.

Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kebahagiaan Penduduk di Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) yang dapat mewakili jenjang pendidikan yang lebih tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Koefisien regresi variabel rata-rata lama sekolah sebesar 5,576003 artinya jika rata-rata lama sekolah meningkat ke jenjang yang lebih tinggi maka tingkat kebahagiaan di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera akan naik sebesar 5,58 indeks, ceteris paribus. Maka, dapat dinyatakan bahwa rata-rata lama sekolah yang dapat mewakili jenjang pendidikan yang lebih tinggi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan hipotesis. Adanya jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik secara vertikal seperti status pendidikan yang lebih tinggi ataupun secara horizontal dengan adanya pelatihan, pengalaman, organisasi, kursus, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kompetensi yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan sertifikat akan membuat seseorang memperoleh pengakuan di masyarakat sehingga akan meningkatkan kebahagiaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen (2012) yang mengungkapkan individu yang menerima lebih banyak pendidikan memiliki jaringan sosial yang lebih serta keterlibatan yang lebih besar dengan dunia yang lebih luas, kondisi kehidupan ini berhubungan positif dengan kebahagiaan. Penelitian Cuñado & de Gracia (2012) menemukan bahwa tingkat pendidikan setiap individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan dan ditemukan efek langsung dan tidak langsung (melalui pendapatan dan status kerja) pendidikan terhadap kebahagiaan, ditemukan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk dipekerjakan, dan karenanya melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Hasil penelitian Jongbloed (2018) menunjukkan bahwa dampak pendidikan bervariasi secara signifikan. Penelitian lainnya, Michalos (2008) menyatakan bahwa untuk dapat melihat keterkaitan antara pendidikan dengan kebahagiaan tidak dapat dilakukan secara langsung namun tergantung kepada definisi dan operasionalisasi pendidikan, pengaruh, dan kebahagiaan.

Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian diturunkan secara terus menerus dari satu generasi ke generasi

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau bahkan penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi sangat mungkin terjadi secara otodidak.

Pendidikan tidak bisa dilupakan dalam amanat pembangunan nasional. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan membuat seseorang menjadi output yang siap. Siap dalam menghadapi dunia kerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu, peran pendidikan tidak akan pernah bisa digantikan di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Tingginya jenjang pendidikan yang diperoleh masyarakat tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti mendirikan sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, meningkatkan budaya literasi meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas sekolah, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah dan pemberantasan buta huruf di dalam masyarakat. Usaha lainnya seperti pemberian motivasi dan pengertian yang tinggi kepada pendidik sehingga budaya yang menyebut bahwa pendidikan tidak penting akan hilang dan angka putus sekolah bisa diminimalisir.

Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kebahagiaan Penduduk di Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup (AHH) yang dapat mewakili kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Koefisien regresi variabel Angka Harapan Hidup sebesar 0,297532 artinya jika Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 1 tahun maka tingkat kebahagiaan di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera akan naik sebesar 0,30 indeks, *ceteris paribus*. Maka, dapat dinyatakan bahwa AHH mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. AHH yang dapat mewakili kesehatan belum dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, dimana AHH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Adanya AHH yang tinggi jika tidak diikuti dengan produktivitas dan keahlian yang baik maka AHH hanya akan menurunkan kebahagiaan seseorang. Dengan demikian, AHH yang tinggi tidak berarti apa-apa jika tidak dibarengi dengan kualitas hidup yang baik. Adanya tingkat kriminalitas yang tinggi juga akan membuat seseorang merasa takut dan tidak aman terhadap kelangsungan hidupnya sehingga menurunkan kebahagiaan penduduk.

Penelitian Novi et al. (2016) menyatakan apabila AHH yang tinggi tidak disertai dengan keahlian yang memadai maka hal tersebut akan menimbulkan masalah di dalam kehidupan sehingga tingkat kebahagiaan akan turun. Sehingga pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera, AHH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan, akibat penduduknya memiliki keahlian yang rendah.

Rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) menjadi beban yang mempengaruhi kebahagiaan, pada tahun 2017 rasio ketergantungan sebesar 48,1 turun dari posisi pada tahun 2016 yaitu sebesar 51,3. Hal tersebut memiliki arti bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48-49 orang. Hal tersebut juga belum termasuk usia produktif yang menganggur sehingga akan menambah beban yang harus ditanggung oleh usia produktif. Semakin beratnya beban yang harus ditanggung maka akan semakin menurunkan tingkat kebahagiaan. BPS juga menyebutkan jika jumlah penduduk lansia semakin meningkat maka akan menyebabkan tuntutan kesehatan yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban ekonomi bagi penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia lanjut.

Rendahnya tingkat kesehatan penduduk Indonesia akan menjadi faktor yang dapat menurunkan tingkat kebahagiaan seperti berbagai masalah kesehatan yang tinggi dan belum teratasi seperti gizi buruk, kematian ibu dan bayi, dan TBC yang dapat menurunkan kesejahteraan penduduk. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, BPS menyebutkan bahwa tenaga kesehatan memiliki perbandingan sebesar 1: 250.000 penduduk, hal tersebut menunjukkan betapa minimnya tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya fasilitas kesehatan sehingga akan menyebabkan tidak meratanya akses kesehatan penduduk Indonesia yang akan menurunkan kebahagiaan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas hingga pelosok negeri akan mampu menyediakan kesehatan yang baik untuk masyarakat.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kebahagiaan Penduduk di Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan (KPN) dengan menggunakan alat indeks gini ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Koefisien regresi variabel ketimpangan pendapatan sebesar -25,71662 artinya jika ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 1 indeks maka tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera akan turun sebesar 25,72 indeks, *ceteris paribus*. Maka, dapat dinyatakan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk.

Apabila suatu wilayah semakin timpang maka dapat merepresentasikan adanya perbedaan pendapatan yang besar di masyarakat dan partisipasinya terhadap tingkat kebahagiaan semakin rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan hipotesis. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Graham & Felton (2006) yang menemukan korelasi negatif antara ketimpangan pendapatan dan kebahagiaan, terutama di kalangan masyarakat miskin. Penelitian Tavor et al. (2018) menemukan bahwa ketimpangan yang ekstrim terhadap efek kebahagiaan adalah negatif. Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan dan kebahagiaan, sehingga tingkat ketimpangan yang tinggi menurunkan kebahagiaan Alesina et al. (2004). Penelitian lainnya, Oishi et al. (2011) menemukan adanya hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan dan kebahagiaan pada responden berpenghasilan rendah.

Ketimpangan pendapatan terjadi akibat tidak meratanya perekonomian seperti pusat-pusat perekonomian lebih banyak di kota dibandingkan di desa sehingga kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di kota, sebab lain seperti perbedaan kandungan SDA, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja sehingga usaha untuk mengurangi ketimpangan pendapatan bisa dilakukan seperti pemberdayaan ekonomi lokal dengan lebih mengedepankan produk-produk domestik dan tidak menjamurnya supermarket menjadi suatu usaha untuk lebih pemeratakan pendapatan masyarakat.

Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia Terhadap Tingkat Kebahagiaan Penduduk di Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mewakili kebebasan demokrasi di Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Koefisien regresi variabel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 0,043470 artinya jika kebebasan demokrasi seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berpendapat, dan berserikat meningkat sebesar 1 indeks maka tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera akan naik sebesar 0,04 indeks, *ceteris paribus*. Maka, dapat dinyatakan bahwa IDI mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. Indeks Demokrasi Indonesia yang dapat mewakili kebebasan demokrasi di Indonesia belum dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini. Indeks Demokrasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir rupanya mengalami penurunan, pada tahun 2016,

Indonesia pernah menempati peringkat ke-48 dengan skor 6,97, sedangkan pada tahun 2017 posisi Indonesia terus turun hingga menempati peringkat ke-68 dengan skor 6,39, dan terakhir pada tahun 2020 posisi Indonesia sangat drastis selama kurun waktu 14 tahun yaitu indeks demokrasi Indonesia menempati posisi ke-102 versi The Economist Intelligence Unit (EIU). Banyak terjadi masalah yang dapat mempengaruhi kebebasan demokrasi seperti dirampasnya kebebasan media dan kebebasan lainnya termasuk masalah pemerintahan, budaya politik yang sulit berkembang, dan rendahnya tingkat partisipasi politik yang menurunkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Semakin rendahnya indeks demokrasi Indonesia yang menunjukkan makin lemahnya demokrasi juga akan dapat berbanding lurus dengan tingginya angka korupsi yang akhirnya akan menurunkan kesejahteraan (well-being) masyarakat.

Terdapat banyak permasalahan terkait kebebasan demokrasi di Indonesia terlebih ketika memasuki tahun-tahun politik, yang diikuti oleh naiknya suhu kecemasan publik, situasi sosial-politik yang tidak stabil, serta banyak terjadi tindakan intoleransi dan pertunjukan aksi kekerasan seperti teror yang merebak luas dalam masyarakat yang dapat menurunkan kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, semakin banyak petinggi negara terjerat kasus korupsi, dan keadilan yang tumpul di atas tajam dibawah menjadi faktor yang cukup mengurangi kebahagiaan hidup penduduk di Indonesia khususnya di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Sehingga bagaimana pemerintah mengupayakan agar hidup dan kehidupan masyarakat “bermakna” adalah dengan memberikan persepsi yaitu panjang umur tetap sehat, panjang umur tetap punya uang, panjang umur tetap bisa berekspresi dan berpendapat, panjang umur tetap bisa hidup nyaman dari gangguan ataupun kriminalitas mental, dan berpendidikan tinggi.

Setiap dimensi penyusun indeks kebahagiaan memiliki besaran kontribusi yang berbeda dalam menyusun indeks kebahagiaan. Dimensi yang berkontribusi terbesar dalam penyusunan indeks kebahagiaan adalah dimensi kepuasan hidup yaitu sebesar 34,02% dalam penyusunan indeks kebahagiaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2014 dan 2017. Artinya fenomena Easterlin yang mengatakan bahwa pendapatan tidak membuat orang bahagia, tidak berlaku di Indonesia khususnya di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pendapatan sangat penting untuk meningkatkan kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera karena masyarakat mampu meningkatkan kepuasan tatkala ada peningkatan pendapatan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan. Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2014 dan 2017. Artinya jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga mampu menghasilkan keterlibatan dalam meningkatkan pendapatan ataupun kesempatan untuk dipekerjakan yang lebih besar bagi masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi sehingga terjadi peningkatan kebahagiaan. Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2014 dan 2017. Artinya AHH belum mampu dan memungkinkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Panjang umur belum tentu menjamin kebahagiaan jika tidak diikuti dengan adanya pendapatan yang mampu menjamin hari tua dan jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga akan menurunkan produktivitas dan keahlian seseorang dan menjadi beban ketergantungan yang tinggi (*dependency ratio*). Dengan demikian, AHH yang tinggi belum bisa berarti apa-apa jika tidak dibarengi dengan kualitas hidup yang baik dan didukung adanya pendapatan yang pasti. Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2014 dan 2017. Artinya ketimpangan pendapatan bisa menurunkan kebahagiaan melalui keresahan, kecemburuan sosial, dan

rendahnya kualitas hidup akibat adanya ketimpangan pendapatan yang semakin buruk. Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kebahagiaan penduduk di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2014 dan 2017. Artinya kebebasan berdemokrasi seperti mengemukakan pendapat, kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat pada masyarakat belum mampu dan memberikan kontribusi bagi peningkatan tingkat kebahagiaan. Kebebasan berdemokrasi belum menjamin kebahagiaan seseorang, jika tidak didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

Limitasi dan studi lanjutan

Limitasi atau kekurangan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan 2 periode dan 10 tempat observasi dengan menggunakan regresi data panel. Pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan variabel lain dan menambah periode penelitian. Alat analisis selain regresi data panel bisa digunakan sehingga hasilnya lebih bervariasi.

Ucapan terima kasih

Puja dan puji syukur ke Hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan saya segala kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Meskipun Artikel saya masih jauh dari kata sempurna, Semoga hasil yang didapatkan sebaik kerja keras yang telah saya berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan Terima kasih.

Referensi

- Ahmad Erani Yustika. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga
- Alesina, A., Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: Are Europeans and Americans different? *Journal of Public Economics*, 88, 2009–2042.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Kebahagiaan 2017. In *Indeks Kebahagiaan 2017 Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/05/1f99cefd596c449b93405fcd/indeks-kebahagiaan-2017.html>
- Bartolini, S., & Bilancini, E. (2010). If not only GDP, what else? Using relational goods to predict the trends of subjective well-being. *International Review of Economics*. <https://doi.org/10.1007/s12232-010-0098-1>
- Berger-Schmitt, R. (2002). Considering social cohesion in quality of life assessments: Concept and measurement. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1023/A:1015752320935>
- Chen, W. chi. (2012). How Education Enhances Happiness: Comparison of Mediating Factors in Four East Asian Countries. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9798-5>
- Clark, A. E., Frijters, P., & Shields, M. A. (2008). Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles. *Journal of Economic Literature*, 46(1), 95–144. <https://doi.org/10.1257/jel.46.1.95>
- Clark, A. E., & Senik, C. (2011). Will GDP growth increase happiness in developing countries? *Revue d'Economie Du Developpement*. <https://doi.org/10.3917/edd.252.0113>
- Cuñado, J., & de Gracia, F. P. (2012). Does Education Affect Happiness? Evidence for Spain. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9874-x>
- Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being. *Psychological Science in the Public Interest*. <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x>
- Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? In Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. *Academic Press*.
- Frey, B. S., & Stutzer, A. (2010). Happiness and public choice. *Public Choice*. <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9681-y>
- _____. (2013). A Revolution in Economics. In *Happiness*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262062770.003.0015>
- Graham, C., & Felton, A. (2006). Inequality and happiness: Insights from Latin America. *Journal of Economic Inequality*. <https://doi.org/10.1007/s10888-005-9009-1>

- Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics 4th Edition. In *Tata McGraw-Hill*.
- . (2007). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Ketiga, Hal. 82-104.
- . (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2004). The social context of well-being. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1522>
- Howell, R. T., & Howell, C. J. (2008). The Relation of Economic Status to Subjective Well-Being in Developing Countries: A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.536>
- Jongbloed, J. (2018). Higher education for happiness? Investigating the impact of education on the hedonic and eudaimonic well-being of Europeans. *European Educational Research Journal*. <https://doi.org/10.1177/1474904118770818>
- Kapteyn, A., Smith, J. P., & Arthur, van S. (2010). Life Satisfaction. In *International Differences in Well-Being*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199732739.003.0004>
- Kesebir, P., & Diener, E. (2008). In Pursuit of Happiness: Empirical Answers to Philosophical Questions. *Perspectives on Psychological Science*. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2008.00069.x>
- Landiyanto, E. A., Ling, J., Puspitasari, M., & Irianti, S. E. (2010). Wealth and Happiness : Empirical Evidence from Indonesia. In *Paper presented at the 10th Indonesian Regional Science Association (IRSA) International Conference 28-29 July 2010, Surabaya, Indonesia*.
- Malia, R., & Hamzah, L. M. (2017). *Analisis Komparasi Happiness Index Provinsi Di Pulau Sumatera*. Mangkoesobroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Michalos, A. C. (2008). Education, happiness and wellbeing. *Social Indicators Research*, 87(3), 347–366. <https://doi.org/10.1007/s11205-007-9144-0>
- Oishi, S., Kesebir, S., & Diener, E. (2011). Income inequality and happiness. *Psychological Science*. <https://doi.org/10.1177/0956797611417262>
- Puji Rahayu, T. (2016). Determinan kebahagiaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 149–170.
- Rositawati, A. F. D., Rositawati, A. F. D., & Budiantara, I. N. (2020). Pemodelan Indeks Kebahagiaan Provinsi di Indonesia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2), D113–D120. http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/45160%0Ahttp://ejurnal.its.ac.id
- Sohn, K. (2014). Considering Happiness for Economic Development: Determinants of Happiness in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2489785>
- Tavor, T., Gonen, L. D., Weber, M., & Spiegel, U. (2018). The Effects of Income Levels and Income Inequalities on Happiness. *Journal of Happiness Studies*. <https://doi.org/10.1007/s10902-017-9911-9>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi. In A. Maulana & N. I. Sallama (Eds.), *Jilid 1* (Kesebelas, pp. 1-517). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- World Bank. 2011. *Defining Welfare Measures*. (<http://web.worldbank.org>, diakses 10 November 2020).